

**EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE  
TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE  
PROVINSI PAPUA**

**Mulyana<sup>1</sup>, Manuel Pieter Stenly Arfayan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno KM. 20, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire, Jl. Merdeka No. 53, Nabire, Indonesia  
Email: mulyana@ipdn.ac.id, arfayanmanuel@gmail.com

**ABSTRAK.** Pasar Sore Tapioka merupakan sektor perekonomian yang memiliki kondisi fisik atau infrastruktur dengan kategori buruk. Kondisi bangunan seperti ini membuat masyarakat membutuhkan sentuhan pemerintah untuk membangun pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan belum efektif. Sesuai dengan indikator teori efektivitas, dimana masih belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan di Pasar Sore Tapioka. Kemudian, masyarakat pelaku ekonomi juga merasa belum puas dengan pembangunan pasar tersebut yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena Pasar Sore Tapioka belum memiliki data teknis atau sertifikat tanah yang jelas. Sertifikat ini menjadi landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan maupun pengembangan Pasar Sore Tapioka karena akan menggunakan anggaran negara. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka ini seyogyanya dilaksanakan, serta pengkinian data kepemilikan tanah anggota masyarakat perlu ditegaskan. Dengan demikian, tertib administrasi pertanahan menjadi modal utama dalam menyukseskan pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Peran Bappeda, Pembangunan Berkelanjutan, Kabupaten Nabire

**THE EFFECTIVENESS OF BAPPEDA'S ROLES IN PLANNING INFRASTRUCTURE  
DEVELOPMENT AT THE TAPIOCA AFTERNOON MARKET, SIRIWINI SUB-  
DISTRICT, NABIRE DISTRICT, PAPUA PROVINCE**

**ABSTRACT.** Pasar Sore Tapioka is a sector of the economy that has bad physical or infrastructure conditions. Building conditions like this make people need a touch from the government to build the market. This study aims to describe and analyze the effectiveness of Bappeda's role in planning infrastructure development in the Sore Tapioka Market, Siriwini Village, Nabire District, Nabire Regency. This study used descriptive qualitative method. Data was collected through interviews, observation, documentation. The selection of informants was based on a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Role of Bappeda in Development Planning has not been effective. In accordance with the indicators of effectiveness theory, where coordination between relevant stakeholders is still not maximized to carry out development at the Tapioca Afternoon Market. Then, the economic community is also not satisfied with the inadequate development of the market, this is because the Tapioca Afternoon Market does not yet have clear technical data or land certificates. This certificate is the basis for implementing development planning and the development of the Tapioca Afternoon Market because it will use the state budget. For this reason, the construction and development of Infrastructure at the Tapioca Afternoon Market should be carried out, as well as updating the data on land ownership of community members needs to be enforced. Thus, orderly land administration is the main capital in the success of infrastructure development at the Tapioca Afternoon Market.

**Keywords:** Effectiveness, Development Planning, Role of Bappeda, Sustainable Development, Nabire District

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan hal yang “berusia lanjut” dan dapat dikatakan bahwa “pembangunan” merupakan kunci yang menentukan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Pembangunan menjadi bentuk dari suatu pergerakan Negara dalam proses menuju kearah yang lebih maju. Pembangunan yang dilaksanakan ini tentu saja memiliki dampak. Dampak positifnya bahwa terciptanya suatu pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat, namun pada sisi lain dampak negatifnya ialah pemerintah harus sanggup menerima tuntutan kebutuhan dalam arti jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) ataupun dalam jenis keperluan yang harus dipenuhi.

Merespon kondisi untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah telah menggulirkan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah dikenalkan sejak masa penjajahan Belanda tahun 1903 yaitu dengan dikeluarkannya *decentralisatiwet* untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mengatur keuangannya sendiri, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif karena di era Kolonial ini masih bersifat sentralistik. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia membuat peraturan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintah di Daerah, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, puncaknya pada tahun 1998

dimana peristiwa krisis fiskal dan moneter serta inflasi yang sangat tinggi terjadi.

Mengubah kan kiblat pembangunan kearah yang lebih baik maka Pemerintah membuat perangkat hukum yang baru yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini berlaku selama lima tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah sadar bahwa Undang-Undang ini perlu untuk diubah menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Negara, sehingga untuk penyempurnaannya maka dibuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berkaitan dengan itu, maka perlu adanya otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonomi urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dalam era otonomi daerah, diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Disamping akan menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pembangunan daerah perlu pemahaman yang menyeluruh artinya dengan melihat berbagai macam potensi yang ada di tiap-tiap daerah dan juga untuk menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di tiap daerah. Maka Pemerintah Pusat harus memberikan perhatian secara intensif kepada Pemerintah Daerah, seperti menumbuhkan inisiatif daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan daerah. Di samping itu diperlukan

keaktifitas pejabat pemerintah daerah (Nadir 2013).

Infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses terhadap lapangan kerja. Pemerintahan Indonesia tengah bekerja keras dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu yang pertama faktor internal diantaranya pengucuran dana yang telah dirancang dan ditetapkan dalam APBD sebagai rencana dan target-target pembangunan, yang kedua adanya faktor eksternal yaitu adanya hambatan yang terjadi dari dalam objek tersebut yang mana sering kita dengar masalah tentang kepemilikan tanah, daerah adat yang sulit di buka oleh pemerintah sehingga anggaran yang disiapkan dipergunakan pembangunan yang lain harus didistribusikan untuk pembebasan tanah dan lain sebagainya.

Kabupaten Nabire adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten Nabire sendiri merupakan salah satu daerah pemekaran dari pemerintah daerah Kabupaten Paniai. Kabupaten Nabire terletak pada bujur barat  $134^{\circ} 33''$  -  $136^{\circ} 15''$  BT dan lintang utara  $2^{\circ} 28''$  -  $3^{\circ} 56''$  LS. Luas wilayah Kabupaten Nabire mencapai 12.075,00 Km<sup>2</sup>, dan panjang garis pantai 473 Km<sup>2</sup> serta luas lautan 914.056,96 Ha. Secara administratif terbagi menjadi 15 Distrik/Kecamatan, 9 kelurahan dan 76 desa (*sumber: BPS kabupaten nabire*). Dari 15 Distrik/Kecamatan salah satunya adalah Distrik Nabire.

Secara administratif pada 2018 ada 13 kelurahan dan 2 kampung di Distrik Nabire. Tercatat sebesar 127,00 km<sup>2</sup> luas wilayahnya. Persebaran pasar tradisional di Distrik Nabire sebanyak enam pasar tradisional yaitu Pasar Kalibobo (Kelurahan Kalibobo), Pasar Karang Tumaritis (Kelurahan Tumaritis), Pasar Oyehe (Kelurahan Oyehe), Pasar Sore Tapioka (Kelurahan Siriwini), Pasar Gotong Royong (Kelurahan Bumi Wonorejo) dan Pasar Kali susu (Kelurahan Kalisusu). Berikut Ini adalah tabel kondisi pasar dalam bentuk profil pasar.

**Tabel 1**  
**Data Profil Pasar Di Distrik Nabire**

No	Nama Pasar	Luas Tanah	Operasional Pasar		Fasilitas Yang Tersedia		Kondisi Pasar
			Bentuk Bangunan	Kondisi	TPS	MCK	
1.	Pasar Kalibobo	20.000	Permanen	Kurang	Ya	Ya	Berat
2.	Pasar Karang Tumaritis	20.000	Permanen	Baik	Ya	Ya	Baik
3.	Pasar Oyehe	15.000	Semi Permanen	Baik	Ya	Ya	Baik
4.	Pasar Sore Tapioka	4.000	Papan	Kurang	Ya	Tidak	Berat
5.	Pasar Gotong Royong	2.500	Semi Permanen	Kurang	Tidak	Ya	Sedang
6.	Pasar Kalisusu	2.000	Semi Permanen	Kurang	Ya	Tidak	Berat

*Sumber:* (Pemerintah Kabupaten Nabire 2017)

EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA  
KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

*Mulyana, Manuel Pieter Stenly Arfayan*

Pada tabel 1. menggambarkan kondisi pasar rakyat yang ada di Distrik/Kecamatan Nabire. Ada tiga kondisi pasar yang terklasifikasi berat atau dengan kata lain rusak dan perlu akan sentuhan dari pemerintah dalam konteks pembangunan fisik. Pasar sore tapioka termasuk dalam kondisi pasar yang tergolong berat, kerusakan tersebut sudah sejak lama terjadi namun dari pihak pemerintah belum melakukan perencanaan maupun pembangunan karena salah satu faktor yang terjadi adalah bahwa pemerintah belum melepaskan tanah pasar tersebut menjadi tanah milik pemerintah.

Masyarakat/para pelaku ekonomi di Pasar Sore Tapioka pun memberikan komentar terkait masalah kesenjangan pembangunan ini, yang mana berbanding terbalik dengan infrastruktur yang ada di Pasar Sentral Kalibobo. Pemerintah telah melaksanakan pembangunan di Pasar Sentral Kalibobo, baik dari sarana dan prasarannya sampai yaitu antara lain akses jalan yang sudah semakin baik dan pembangunan tempat berjualan yang lebih bagus. Pasar tersebut berada di wilayah Distrik/kecamatan Nabire, dengan artian Pasar Sore Tapioka dan Pasar Sentral Kalibobo berada pada satu wilayah namun yang terjadi bahwasanya masih ada masalah sosial terkait pembangunan yang belum dirasakan secara signifikan (PetaLokasi.org 2018).

Kepala Daerah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tugas untuk menjalankan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang ada di daerah. Secara keseluruhan Bappeda adalah instansi yang melaksanakan penetapan perencanaan yang kemudian perencanaan tersebut akan disahkan secara politik menjadi dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaannya juga

harus saling berkoordinasi dengan instansi, swasta dan masyarakat yang juga melakukan proses pembangunan diharapkan dapat berjalan serasi dan tersinkronisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dalam struktur organisasi Bappeda memiliki bagian dan bidang yang akan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa seluruh rancangan rencana daerah tingkat daerah berpedoman pada rancangan rencana tingkat pusat atau pada tingkat nasional. Dalam pasal 2 ayat (4) sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah, 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, 5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Peran Bappeda sebagai Badan yang mengkaji dan merencanakan pembangunan di daerah akan dinilai efektif apabila tujuan terlaksana. Tujuan tersebut merupakan output perencanaan yang berdampak pada sebuah pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang ada di Pasar Sore Tapioka sebagai isu yang penulis gambarkan bahwasanya perlu untuk dilaksanakan pembangunan. Gibson mengatakan bahwa efektifitas di dalam organisasi ada beberapa dimensi yaitu pendek, menengah dan panjang. Dari dimensi tersebut ada indikator yang menyatakan bahwa organisasi tersebut

sudah efektif. Efektivitas peran dari Bappeda akan berdampak pada perencanaan pembangunan yaitu infrastruktur di Pasar Sore Tapioka.

Kajian tentang efektivitas organisasi sudah dilakukan oleh beberapa akademisi antara lain Nazalyus yang mengkaji tentang Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nazalyus (2012) mengkaji dan membuatnya dalam bentuk tugas akhir program magister (TAPM). Kajian tersebut tentang efektivitas organisasi tersebut menunjukkan bahwa dapat melihat efektifitas badan perencanaan melalui mekanisme perencanaan dan ketersediaan dokumen yang dihasilkan serta *benefit* yang dirasakan masyarakat akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasil dari pembahasannya adalah efektivitas organisasi dinilai dari struktur organisasi, proses perencanaan dan dokumen dari perencanaan yang tercapai sesuai dengan tujuan yang telah disepakati (Nazalyus, 2012:80-88).

Efektivitas organisasi memiliki kriteria meliputi: pertama, kriteria kemampuan efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup Gibson (Steers, 1985:53). Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba dan kesejahteraan pegawai. Sistem perkantoran juga dapat diukur keefektifannya. Kriteria pengukuran/indikator pada konteks perkantoran antara lain sebagai yaitu, a)

kejelasan tujuan yang hendak dicapai; b) kejelasan strategi pencapaian tujuan; b) proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; d) perencanaan yang matang; e) penyusunan program yang tepat; f) tersedianya sarana dan prasarana kerja; g) pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan h) sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik Gibson (Priansa, 2014:11).

Bappeda merupakan tim atau sebuah organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Agar dapat dikatakan efektif maka Bappeda Kabupaten Nabire harus menjalankan fungsinya dengan baik hingga pencapaian. Isu permasalahan yang penulis angkat sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Gibson tentang efektivitas organisasi untuk menentukan dan melihat upaya Bappeda dalam keefektifan organisasinya sehingga akan memberikan dampak perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka.

Kajian sebelumnya yang memfokuskan pada peran Bappeda sudah pernah dilakukan. Temuan penelitian menyebutkan bahwa efektifitas kinerja dari Bappeda dapat dinilai dari adanya kualitas dan kuantitas pekerjaan, kehadiran dan ketepatan waktu, inisiatif serta kerjasama (Ali 2018). Selain itu peran dari Bappeda pada perencanaan pembangunan partisipatif dapat diukur dari adanya komunikasi yang baik, aspek Bappeda dalam memandu kegiatan, melakukan identifikasi instansi yang memiliki keterkaitan dan kepentingan kegiatan, dan aspek lainnya (Rizam 2019). Sementara terdapat faktor yang dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan peran Bappeda dalam membangun desa diantaranya aspek dana dan aspek sumber daya manusia (Bahralipi 2017). Di sisi lain,

dalam melakukan penyelesaian permasalahan dalam aspek pembangunan infrastruktur, peran Bappeda perlu diawasi oleh Inspektorat (SANTIKA 2021). Dalam mengefektifkan suatu program maka perlu adanya partisipasi dan kontribusi dari masyarakat (Fariani, Dirlanudin, and Ismanto 2014). Sejalan dengan temuan penelitian lainnya dimana dalam mewujudkan efektifitas suatu program maka dibutuhkan kerjasama antar stakeholder pada suatu pembangunan (Ihkamuddin, Octavian, and Putra 2020). Dalam perannya Bappeda pun menjadi instansi yang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pada level kelurahan, pelaksanaan Musrenbang dapat diukur efektivitasnya melalui 3 aspek yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Sunarti 2015). Begitu pula yang terlihat pada temuan penelitian lain dimana dalam rangka melaksanakan pembangunan, Bappeda memiliki peran yang penting. Dimulai dari peran dalam merumuskan kebijakan yang diawali pada kegiatan Musrenbang level desa atau kelurahan, kecamatan, hingga level kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan peran tersebut, dinilai penting untuk memperhatikan aspek komitmen pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi (TOMPO 2015).

Merujuk pada uraian tersebut, diperoleh informasi bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun, fokus penelitiannya sama, tetapi pada penelitian ini, peneliti menggunakan pisau analisis dari efektivitas organisasi yang disampaikan oleh Gibson dalam Priansa (2014). Hal tersebut menunjukkan kebaruan dari penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah

efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire?. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

## METODE

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk membahas isu yang terkait dengan efektivitas peran dari Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka yang nantinya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkhusus bagi pelaku ekonomi di Pasar Sore Tapioka. Sebagai sebuah badan yang menunjang urusan pemerintahan di daerah maka Bappeda sudah semestinya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan metode ini juga akan memberikan uraian bahwasanya peran Bappeda dalam melaksanakan perencanaan sangat penting dalam pembangunan sesuai dengan fakta dan data yang telah penulis tuangkan pada bab sebelumnya.

Teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, pengumpulan data dengan dokumentasi dan pelaksanaan wawancara. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk memperoleh suatu validitas informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah agar penulis

dapat menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih informan yang penulis anggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan penelitian ini adalah Kepala Instansi, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bidang Jasa, Industri & SDA, Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana, Penjual di Pasar Sore Tapioka. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dalam melakukan suatu penelitian, karena dengan adanya

analisis data, yang diteliti bisa diberi arti dan makna yang berguna untuk kegiatan penelitian agar lebih mudah dalam memecahkan masalah. Dalam analisis data pada penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari suatu masalah yang akan diteliti secara mendalam dan seksama. Data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis. Beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Adapun operasionalisasi konsep penelitian ini adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.**  
**Operasional Konsep Penelitian**

Judul	Dimensi		Indikator
<b>Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwin, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua</b>	<b>Efektivitas Organisasi</b>	<b>Jangka Pendek</b>  - Produksi: BAPPEDA Menetapkan Rencana-Rencana Terkait Pembangunan Infrastruktur. - Efisiensi: Tepat Pada Pelaksanaan Dan Target - Kepuasan: Masyarakat Pelaku Ekonomi Di Pasar Sore Timika Merasakan Dampak Pembangunan.	1. Proses pembuatan dokumen perencanaan 2. Pelaksanaan Tupoksi Setiap Bagian dan Bidang terkait Pembangunan Infrastruktur 3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Di Pasar Sore Tapioka 4. Kepuasan Pedagang di Pasar dan Kepuasan Masyarakat yang Berbelanja di Pasar terkait Infrastruktur Yang Tersedia.
		<b>Jangka Menengah</b>  Persaingan Dan Pengembangan Antar Pegawai Di Kantor	1. Latar Belakang Pegawai Sesuai Dengan Posisi/Kedudukan. 2. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan
		<b>Jangka Panjang</b>  Kelangsungan Pelaksanaan Masing-Masing Tugas Pada Tata Organisasi Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	1. Pelaksanaan Tugas Dari Seluruh Bagian Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pembangunan Untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Gibson, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Profesional* (Priansa 2014) & Analisa Penulis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka

Efektivitas dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu keberhasilan keluaran. Organisasi yang berjalan dengan efektif akan memberikan dampak yang baik bagi keluarannya. Untuk menjalankan suatu organisasi maka perlu adanya pemimpin organisasi serta bagian-bagian dan bidang-bidang yang saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik. Semakin efektif juga pekerjaan di dalam lingkup organisasi Bappeda apabila ditunjang dengan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan beradaptasi atau dapat menggunakan sistem informatika/teknologi. Dengan sistem informatika maka semua data dan informasi dapat diolah dengan lebih mudah dalam sinkronisasi. Data-data serta informasi yang sinkron merupakan bagian pengelolaan data yang akan menjadi dasar dalam pembangunan dan pengembangan daerah termasuk pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka. Penulis menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka dengan menggunakan teori Gibson. Menurut Gibson efektivitas suatu organisasi terbagi dalam lingkup jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Priansa 2014).

#### 1) Jangka Pendek

Efektivitas organisasi dalam lingkup jangka pendek ini dilihat dari beberapa indikator. Indikator-indikator ini meliputi kemampuan produksi, efisien dan kepuasan. Indikator-indikator tersebut akan dianalisis sebagai berikut.

#### a. Produksi

Produksi merupakan sebuah hasil dari suatu tugas yang telah dijalankan. Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan fungsi membuat dokumen perencanaan yang dianggap sebagai kitab suci pembangunan di daerah Kabupaten Nabire. Dokumen perencanaan ini merupakan produk atau hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Setelah itu, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) usulan program/kegiatan tersebut dievaluasi dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Perda) menjadi Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire (APBD). Kepala Bappeda Kabupaten Nabire Bapak Michael Danomira, S.STP menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan di ruang kerjanya pada Tanggal 18 Januari 2021, beliau mengatakan:

pelaksanaan musrenbang selama ini yang kami laksanakan di Kabupaten Nabire, kami sudah melaksanakan tahapan dari tingkatan bawah, dari tingkatan kampung, tingkat distrik, dan sampai tingkatan kabupaten kemudian kami melanjutkan ke tingkatan Provinsi dan Pusat dan selama ini sudah berjalan dengan baik karena kami mulai dari bawah kami menyerap semua aspirasi-aspirasi yang ada di kampung.

Lanjut Danomira menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire. Beliau mengatakan:

dalam pembangunan infrastruktur di pasar sore ini mungkin kita beberapa saat kemarin sudah mengusulkan ini untuk kita rencanakan di tingkatan kabupaten untuk kita bangun namun tidak terlepas dari ketika kita bicara sesuatu yang harus kita kerjakan



maka data teknis ini sangat mendukung sekali pertama saya ambil contoh sertifikat dan lain sebagainya. Pemerintah membangun sesuatu harus mempunyai data teknis yang jelas sehingga kedepan asset ini harus menjadi inventaris pemda, konsekuensi dari apa yang dibangun oleh Pemerintah Daerah atau sumber dana kita memakai dana Negara itu memiliki konsekuensinya yaitu harus menjadi asset pemda, tetapi kalau data teknis seperti yang saya sampaikan tadi tidak jelas seperti sertifikat dan lain sebagainya, kita bangun pakai uang Pemda tapi kemudian akan menjadi milik perorangan. Dan ini sangat menyalahi aturan dan bisa menjadi temuan.

Dari tanggapan wawancara tersebut di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa pelaksanaan kegiatan musrenbang Kabupaten Nabire adalah kegiatan tahunan yang sudah dilakukan oleh Bappeda dengan kategori baik. Penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Bappeda sudah dilakukan secara tepat karena langsung dilakukan di kampung-kampung dan berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire. Penulis juga memberikan simpulan terkait pembangunan infrastruktur di Pasar sore bahwa pembangunan terhadap pasar sore sudah diusulkan namun memiliki kendala yaitu Pasar Sore Tapioka tidak memiliki data-data teknis dalam hal ini adalah sertifikat yang jelas.

Selain itu terkait dengan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Nabire dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Sore

Tapioka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid fisik sarana dan prasarana Bapak Frans Dogomo, SE pada Tanggal 14 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

Pembangunan infrastruktur di pasar sore ini hal pertama yang harus kita ketahui soal pasar sore ini milik pemerintah atau masyarakat lokal. Setahu saya waktu masih di Dinas pendapatan daerah sering menangani setiap pasar pasar yang ada soal retribusi pasar, soal retribusi parkir, namun di pasar sore ini sifatnya adalah swadaya masyarakat dan sampai hari ini dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian beberapa kali dilakukan usulan untuk diperhatikan oleh pemerintah supaya setidaknya sama dengan pasar-pasar yang lain namun kembali lagi kepada yang namanya asset yang mana pasar sore tapioka ini adalah swadaya dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menginventarisir salah satu kendala yang ditemukan di Bappeda Kabupaten Nabire dalam proses perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah: yang menghambat pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka ialah data teknis pendukung yang tidak memadai. Pasar Sore Tapioka merupakan jenis pasar rakyat yang tidak memiliki kejelasan sertifikat tanah sehingga Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan sulit dalam melakukan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, proses pembangunan di Pasar Sore Tapioka ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Dinas terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan pembangunan disana dikarenakan permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Penulis memberikan interpretasi bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan indikator pada teori yang penulis gunakan sangatlah relevan dan dapat dianalisis. Berdasarkan indikator produksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap-tahap yang dilakukan untuk membuat sebuah dokumen perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana tupoksi dari Bappeda. Pada tahap ini Bappeda menjalankan fungsinya sebagai pemberi arahan kepada perangkat daerah terkait usulan program/kegiatan. Setelah itu, usulan-usulan tersebut akan menjadi sebuah rancangan perencanaan dan akan ditetapkan oleh DPRD menjadi APBD.

#### **b. Efisiensi**

Efisiensi merupakan tolak ukur kinerja pada suatu usaha yang akan menunjukan pekerjaan yang lebih mumpuni dan tepat dalam mengerjakan sesuatu (Steers 1985). Dalam penelitian ini penulis akan memberikan informasi tentang efisiensi di lingkungan Bappeda Kabupaten Nabire. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Program Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bapak Irwan Bara, S.IP di ruang kerjanya pada Tanggal 15 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa: “menurut saya di Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Nabire perencanaan yang direncanakan sudah tepat”. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda Bapak Maikel Danomira, S.STP pada Tanggal 18 Januari 2021 di ruang kerjanya. Beliau mengatakan:

kinerja Bappeda Kabupaten Nabire sampai saat ini saya amati dan saya lihat sudah efektif karena setiap bidang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pokok dan fungsinya dan sudah berjalan secara efisien apalagi saat ini kita diperhadapkan

dengan harus kita melaksanakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan teman teman di bidang masing-masing sudah melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire.

Dari tanggapan wawancara di atas penulis dapat memberikan informasi bahwa di lingkungan Bappeda sudah pelaksanaan tupoksi pada masing-masing bidang dengan efisien. Selanjutnya, hasil wawancara dari Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bahwa sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik serta efisien. Penulis menginterpretasikan bahwa pelaksanaan tupoksi dari seluruh bagian yang ada di Bappeda dapat dikatakan efisien. Dengan demikian, sesuai dengan indikator efisiensi ini maka penulis simpulkan bahwa lingkup dari instansi Bappeda Kabupaten Nabire dalam melaksanakan tupoksi masing-masing bagian maupun bidang sudah tepat.

#### **c. Kepuasan**

Kepuasan merupakan tolak ukur atau indikator yang dinilai dari tanggapan satu individu atau kelompok bahwa hal yang diberikan dapat mencukupinya atau bahkan memberikan kelebihan dan kemudahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual di pasar sore Ibu Musdalifa pada Tanggal 27 Januari 2021, mengatakan bahwa:

bangunnya kan kita bikin sendiri, kita bangun sendiri kan pasar rakyat...jadi kalau masalah pembangunan itu kita masing-masing bangun,tidak pembangunan yang dilakukan pemerintah, kami timbun sendiri, sampah atau kebersihan kami yang bayar sendiri, kemudian masalah keamanan ...., pernah mereka adakan forum yang

dilaksanakan dari salah satu adat (orang pesisir) yaitu membangun kembali pasar sore ini. Kita mau untuk pasar ini dibangun seperti pasar-pasar lain karena pembeli yang bagus (banyak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yakomina Nasadit penjual di pasar sore pada Tanggal 27 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa: “jadi pasar sore ini begini dari dulu sampai sekarang ini begini terus dan tidak ada perubahan, kondisi jalan dan bangunan sampai sekarang ini tidak ada perubahan..., dulu memiliki ketua pasar (Alm) Pak. Nunaki tapi setelah meninggal sudah tidak ada yang menjadi ketua/mandor di pasar”. Merujuk tanggapan wawancara di atas penulis dapat menginformasikan bahwa pemerintah sampai saat belum melakukan pembangunan terkait infrastruktur di Pasar Sore Tapioka. Menurut Musdalifa dan Nasadit bahwa bangunan-bangunan yang digunakan sekarang merupakan bangunan yang dibuat sendiri. Nasadit mengatakan bahwa bangunan dan jalanan tidak berubah sejak dulu sampai saat ini. Sedangkan Udam mengatakan sudah ada kios-kios semi permanen dalam namun masih sedikit. Selanjutnya, para penjual juga mengkhawatirkan akan jaminan keamanan mereka. Olehnya itu dapat dikatakan bahwa penjual di pasar sore tapioka di kategorikan tidak puas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kornelia Udam pengunjung di pasar sore tapioka pada Tanggal 26 Januari 2021, beliau mengatakan:

Kondisi Pasar Sore Tapioka saat ini boleh dikatakan masih kurang baik karena tata penataan tempat jualannya belum rapi. Kemudian, kalau hujan kondisinya pecek dan

tempat parker roda dua dan roda empat belum terlalu rapi sehingga masih ada mama-mama yang berjualan sampai kedepan jalan mengakibatkan kendaraan macet. Kalau dari lima tahun terakhir memang ada sedikit perubahan sudah ada yang ditimbulk kemudian ada kios-kios yang dibuat semi permanen tetapi belum banyak baru sebagian kecil. Untuk infrastrukturnya kondisinya masih sangat memprihatinkan, seperti jalan jalan yang masih berlubang, tempat jualannya masih pecek masih belum bagus ketika hujan dan sangat sulit sekali untuk orang berjualan maupun berbelanja dengan baik atau masih belum rapi.

Berdasarkan informasi tersebut juga dapat penulis amati bahwa pedagang dan masyarakat yang berbelanja di Pasar Sore belum merasa puas terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Sementara, pada pembangunan bidang infrastruktur dinilai sebagai salah satu pelayanan pemerintah yang juga dapat berdampak pada kepuasan semua pengguna pasar (Anggoro, Ulimaz, and Syafitri 2020; Juandi 2019). Adanya fasilitas pendukung yang memadai juga dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan pengguna pasar (Wijayanto 2017). Selain itu dengan belum memadainya sarana dan prasarana pada suatu pasar dapat berimplikasi pada tidak efektifnya kepuasan yang dirasakan oleh pengguna pasar (Asma 2016).

Penulis dapat menginterpretasikan bahwa sebuah keluaran hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah dari segi perencanaan belum dapat dikategorikan baik. Sesuai dengan indikator kepuasan dan penjelasan di atas maka dapat dianalisis bahwa belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan

Bappeda dalam berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka dalam meningkatkan Kepuasan masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

## 2) Jangka Menengah

Efektivitas organisasi dalam lingkup jangka menengah menguraikan tentang persaingan dan pengembangan pegawai dikantor (Steers 1985). Dalam penelitian ini penulis menentukan hanya dalam pengembangan kantor yang terjadi antara pegawai-pegawai dikantor. Indikator pengembangan tersebut akan penulis analisis sebagai berikut.

### a. Latar Belakang Pendidikan Sesuai Dengan Jabatan Atau Posisi/Kedudukan

Latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting untuk mengetahui potensi sumberdaya yang dimiliki. Pendidikan yang sesuai dengan jabatannya akan lebih berdampak karena memiliki disiplin ilmu yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapak Roy B. Tampubolon, SE yang dilakukan di ruang sekretariat Bappeda pada Tanggal 14 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

jadi untuk Bappeda sesuai dengan pengetahuan kami kasubag umum dan kepegawaian latar belakang dan penempatan staf dan pegawai sesuai dengan bagan dan bidang yang ada di Bappeda dan sesuai dengan petunjuk pimpinan berdasarkan jurusan ataupun diploma pendidikan ijazah yang ada maka penempatan nya disesuaikan dengan jurusan tersebut. Seperti contoh bidang prasarana dan sarana umumnya disitu adalah sarjana teknik karena disitu membicarakan masalah

pembangunan jadi penempatan itu di klasifikasi sesuai dengan jurusan dan ijazah yang ada seperti ekonomi kebanyakan adalah sarjana ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda Bapak Maikel Danomira, S.STP pada Tanggal 18 Januari 2021 di ruang kerjanya. Beliau mengatakan:

kinerja Bappeda Kabupaten Nabire sampai saat ini saya amati dan saya lihat sudah efektif karena setiap bidang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pokok dan fungsinya dan sudah berjalan secara efisien apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan harus kita melaksanakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan teman teman di bidang masing-masing sudah melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nabire.

Berdasarkan wawancara tersebut diatas maka penulis dapat memberikan informasi bahwa penempatan pegawai dalam lingkungan organisasi Bappeda Kabupaten Nabire sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Pegawai pada bidang-bidang teknis sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Di sisi lain seperti yang sudah disampaikan oleh kepala Bappeda bahwa Kinerja dari Bappeda Kabupaten Nabire pada saat ini dikategorikan baik karena telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan indikator teori yang penulis gunakan maka sebagai interpretasi nya dapat dikatakan bahwa setiap lini jabatan di Bappeda baik itu pemimpin maupun pelaksana sudah diisi dengan tepat. Pada bidang-bidang terdapat pegawai dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang tersebut. Dengan demikian, relevansi antara teori dan fenomena yang terjadi

memberikan gambaran seperti yang sudah dibahas di atas.

### **b. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pekerjaan**

Pemanfaatan teknologi dalam bekerja merupakan hal yang wajib dipahami oleh seluruh anggota organisasi atau dalam hal ini adalah pegawai Bappeda. Penggunaan teknologi saat ini wajib untuk diterapkan dalam rangka penyederhanaan pekerjaan serta untuk akuntabilitas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapak Roy B. Tampubolon, SE pada Tanggal 14 Februari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

teknologi ini, artinya sesuai dengan perkembangan aplikasi untuk penyesuaian masing-masing daerah sejauh ini sesuai dengan perkembangan intinya kalau Bappeda tetap mengutamakan perkembangan aplikasi terbaru dan langsung disesuaikan artinya kita mengikuti aplikasi-aplikasi teknologi yang ada dalam bentuk Permen, aplikasi SIPD. Initanya langsung disesuaikan atau diikuti sesuai dengan perkembangan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Bapak Michael Danomira, S.STP pada Tanggal 18 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa: “Bappeda saat ini di hadapkan dengan aplikasi SIPD, dan pegawai di bidang-bidang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada kendala dengan infrastruktur jaringan dan SDM yang kurang namun demikian pegawai Bappeda saling berkoordinasi dalam menggunakan aplikasi SIPD ini”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diinformasikan bahwa sumber daya aparatur yang ada di Bappeda Kabupaten Nabire sebagai anggota organisasi sudah memahami dan mengikuti perkembangan teknologi. Sistem informasi Pemerintahan Daerah saat ini dapat menjadi tolak ukur bahwa pegawai mampu mengoperasikan aplikasi tersebut sampai pada tahap perencanaan dan penganggaran. Penulis menginterpretasi berdasarkan teori terkait dengan penggunaan teknologi dalam menunjang pekerjaan di kantor dapat diterapkan oleh masing-masing aparatur. Namun demikian, Bappeda Kabupaten Nabire memiliki kendala pada infrastruktur jaringan dan sumberdaya aparatur manusia namun dapat ditanggulangi dengan saling berkoordinasi antar pegawai yang ada. Sesuai dengan pengamatan penulis pada saat melakukan magang penelitian ini, didapati bahwa setiap bidang di kantor Bappeda saling berkoordinasi dalam hal mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

### **3) Jangka panjang**

Efektivitas dalam jangka panjang ini menguraikan tentang kelangsungan pelaksanaan masing-masing tugas pada tata organisasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di pasar sore tapioka. Ada beberapa indikator ada dalam dimensi ini yaitu: 1) pelaksanaan tugas dari bidang yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan terkait infrastruktur ini penulis menentukan dua informan yaitu dari bidang perekonomian dan bidang fisik dan sarana prasarana; 2) koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan infrastruktur.

**a. Pelaksanaan Tugas Bidang Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dalam pembangunan infrastruktur pada Pasar Sore Tapioka, maka bidang yang terkait ialah bidang ekonomi dan bidang fisik sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Jasa, Industri dan Sumber Daya Bapak Eddy L. Syaifuddin, S.Hut pada Tanggal 14 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

sesuai dengan kita punya tupoksi itu kan bidang ekonomi terbagi atas dua seksi yang pertama agribisnis yang didalamnya itu ada empat perangkat daerah yang menangani dan seksi yang kedua itu adalah jasa industri dan sumberdaya alam ada tujuh perangkat daerah yang ditangani jadi perencanaan terkait 11(sebelas) perangkat daerah yang di bawah.

Lukman lanjut mengatakan bahwa:

pembangunan terkait infrastruktur biasanya ditujukan kepada sector pertanian, perdagangan seperti pasar untuk pasar sore tapioka status pasar itu bukan pasar milik pemerintah dan informasi terakhir pasar sore itu milik masyarakat disekitar situ yang dikelola sendiri dan memberikan kepada masyarakat tempat untuk menjual sehingga pemerintah belum bisa sampai kesana. Syarat untuk tempat untuk dibangun pasar antara lain iyalah statusnya harus jelas dan jangka panjang agar dapat direhab tidak terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Fisik Sarana dan Prasarana Bapak Frans Dogomo, SE pada tanggal 14 januari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

pembangunan infrastruktur di pasar sore ini hal pertama yang harus kita ketahui soal pasar sore ini milik pemerintah atau masyarakat lokal. Setahu saya waktu masih di Dinas pendapatan daerah sering menangani setiap pasar pasar yang ada soal retribusi pasar, soal retribusi parkir, namun di pasar sore ini sifatnya adalah swadaya masyarakat dan sampai hari ini dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian beberapa kali dilakukan usulan untuk diperhatikan oleh pemerintah supaya setidaknya dengan pasar-pasar yang lain namun kembali lagi kepada yang namanya asset yang mana pasar sore tapioka ini adalah swadaya dari masyarakat.

Dari wawancara tersebut diatas penulis dapat memberikan simpulan bahwa masing-masing bidang memiliki sub-sub bidang yang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Masing-masing bidang dalam pelaksanaan tupoksinya juga memiliki beberapa dinas terkait yang saling berkoordinasi tentang pelaksanaan pembangunan. Penulis menginterpretasikan bahwa sesuai dengan teori yang penulis gunakan untuk mengkaji efektivitas peran Bappeda maka sangatlah relevan. Hal yang diketahui bahwa tupoksi Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan beberapa dinas antara lain Dinas Perdagangan dalam perencanaan pembangunan Pasar Sore demikian juga dengan Bidang Fisik dan Sarana Prasarana yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka. Namun demikian, hal yang harus diperhatikan bahwa tanah yang digunakan oleh pasar sore ini bukanlah asset

daerah sehingga ini menjadi kendala dalam pemeliharaan pasar tersebut.

#### **b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

Koordinasi dan sinkronisasi diperlukan dalam proses perencanaan. Terkait dengan koordinasi maka Bappeda akan berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan bidang dinas tersebut. Sinkronisasi yang baik antara program-program pembangunan akan memberikan dampak pembangunan yang baik pula. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Program Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bapak Irwan Bara, S.IP di ruang kerjanya pada 15 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa:

terkait koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Bappeda pelaksanaan koordinasinya kami laksanakan berdasarkan jadwal perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, di situ kita diawali dengan pengumpulan data kedua pengolahan data dan penyajian data untuk sinkronisasinya itu berada di bagian pengolahan data di mana ketika data-data dari setiap bidang yang ada dikumpulkan dan kami melaksanakan yang namanya forum diskusi untuk kami sinkronkan apa yang akan kami kerjakan di tahun ini dengan acuan tetap kepada dokumen perencanaan 20 tahun atau yang disebut dengan RPJPD dan lima tahunan atau yang di sebut RPJMD itu untuk lingkungan kabupaten yang akan di sinkronkan dengan renstra Bappeda sendiri renstra untuk lima tahunan Bappeda dan dilaksanakan di dalam renja Bappeda sehingga semuanya itu dapat sinkron.

Merujuk hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ini dapat penulis dapat menginformasikan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dan sinkronisasi setiap data-data program pembangunan dikategorikan baik. Proses yang dilakukan disesuaikan dengan aturan yang ada dan terjadwal serta berpatokan pada dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Penulis dapat menginterpretasikan bahwa teori yang penulis gunakan dengan fenomena yang ditemukan adalah bahwa koordinasi dan sinkronisasi program merupakan hal yang penting. Pelaksanaan tiap tahapan harus sesuai dengan peraturan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Seluruh program harus sesuai dengan perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah. Pada tahun ini Kabupaten Nabire masuk kepada periode pemerintahan yang baru yaitu 2021-2024. Sehingga sesuai dengan hasil observasi, Bappeda Kabupaten Nabire pada saat ini sedang melaksanakan tupoksinya membuat RPJMD dan RKPD Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, Koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan demi terbentuknya dokumen perencanaan yang baik.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran Bappeda belum dapat dikatakan baik, karena ternyata masih terdapat permasalahan pada sertifikat tanah dan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut masih sangat signifikan pada efektivitas secara keseluruhan kegiatan pembangunan yang diadakan. Persoalan sertifikat tanah dapat berakibat pada belum

legalnya dibangun infrastruktur dengan dana pemerintah/pemerintah daerah jika belum siap ketersediaan tanahnya. Bahkan kesiapan tanah ini harusnya menjadi *readiness requirement* penting sebelum direncanakan anggaran pembangunannya. Maknanya, Bappeda belum cukup baik menjalankan fungsinya sehingga ketidaksiapan sertifikat tanah tersebut terjadi. Begitu juga kepuasan masyarakat yang belum cukup baik, menjadi indikator ketidaksuksesan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga dapat mengurangi efektivitas pembangunan yang dilakukan. Jika pembangunan yang dilakukan menjadi kurang efektif, maka peran perencanaan oleh Bappeda juga belum dapat dikatakan berfungsi dengan baik. Selain itu masih terdapat kendala dalam penggunaan teknologi dalam menunjang pekerjaan di kantor dapat diterapkan oleh masing-masing aparat.

Peneliti merekomendasikan diantaranya perlu dilakukan agenda bimbingan teknis yang diberikan kepada sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Nabire, masih diperlukan komunikasi intensif antara pengambil kebijakan di level atas bersama dengan dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dan pendapatan daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu untuk dioptimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat oleh karena hal ini menjadi dasar dalam pembangunan agar tepat pada sasaran. Pasar Sore Tapioka mempunyai potensi dalam membantu perekonomian masyarakat apalagi pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Ketersediaan bahan pokok makanan pada Pasar Sore Tapioka ini membuat konsumen antusias dan banyak yang datang. Oleh karena itu, pembangunan dan

pengembangan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka ini harus dilaksanakan, serta pengkinian data kepemilikan tanah anggota masyarakat perlu ditegakkan. Dengan demikian, tertib administrasi pertanahan menjadi modal utama dalam menyukseskan pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nur Sulhana. 2018. "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar." Universitas Negeri Makassar.
- Anggoro, Rizky Bobby, Mega Ulimaz, and Elin Diyah Syafitri. 2020. "Strategi Pengembangan Pasar Waru Di Kabupaten Panajam Paser Utara Berdasarkan Faktor-Faktor Kenyamanan Berbelanja." *R u a n G* 6(2).
- Asma, Nur. 2016. "Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional Pa'baeng-Baeng Di Kota Makassar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9(2).
- Bahralipi, Yudiantno. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jenepono." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fariani, Dirlanudin, and Gandung Ismanto. 2014. "Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Di Kota Cilegon." UNTIRTA.
- Ihkamuddin, Zihni, A. Octavian, and I. Nengah Putra. 2020. "EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG BAHARI DALAM MENJAGA KONDISI SOSIAL MASYARAKAT PESISIR DI SEMARANG DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI MARITIM." *Jurnal Keamanan*



- Maritim* 6(1).
- Juandi, Andang. 2019. "Analisa Hubungan Capaian Pendapatan Retribusi Pasar Terhadap Pelayanan Pedagang Pasar Di Kabupaten Bandung Dari Tahun 2013-2018." Universitas Padjadjaran / Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi.
- Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1:1.
- Nazalyus. 2012. "Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." 15:41674.
- Pemerintah Kabupaten Nabire. 2017. *Data Profil Pasar*. 900. Nabire.
- PetaLokasi.org. 2018. *Pasar Sore Tapioka*. Nabire.
- Priansa, Juni D. 2014. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Rizam, Teuku. 2019. "Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur." Universitas Medan Area.
- SANTIKA, LENS. 2021. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM." UIN RADENFATAH PALEMBANG.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: ERLANGGA.
- Sunarti. 2015. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU." *Jurnal Katalogis* 3(2).
- TOMPO, GUSTI ZULKARNAIN. 2015. "ANALISIS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN JENEPONTO." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wijayanto, Eko. 2017. "Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pengguna Pasar Pemalang Kabupaten Pemalang." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 13(1).